

**AKUNTABILITAS PUBLIK TERHADAP PERATURAN MENTERI  
DALAM NEGERI NOMOR 113 TAHUN 2014 TENTANG  
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA JARAK  
KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO  
TAHUN 2017**



**Oleh :  
SUYITNO  
NIM : 1322 1252**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
PONOROGO**

**2018**

**AKUNTABILITAS PUBLIK TERHADAP PERATURAN MENTERI  
DALAM NEGERI NOMOR 113 TAHUN 2014 TENTANG  
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA JARAK  
KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO  
TAHUN 2017**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna melengkapi Tugas-Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Untuk Mencapai gelar Sarjana Dalam Ilmu Sosial dan Politik Dengan Program  
Studi Ilmu Pemerintahan

**Oleh :  
SUYITNO  
NIM : 1322 1252**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
PONOROGO**

**2018**

## **LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi ini disusun oleh : SUYITNO

Dengan Judul : **AKUNTABILITAS PUBLIK TERHADAP PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 113 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA JARAK KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO**

Pada : 25 Januari 2018

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

**Ponorogo, 25 Januari 2018**

**Pembimbing**

**Dian Suluh Kusuma Dewi, S.Sos. I, M.AP**  
**NIDN. 0703058104**

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul : **AKUNTABILITAS PUBLIK TERHADAP PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 113 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA JARAK KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO**

Disusun oleh : SUYITNO

Telah dipertahankan di depan penguji pada,

Hari : Rabu

Tanggal : 7 Februari 2017

Pukul : 10.00 WIB

### DEWAN PENGUJI

**Penguji I**

**Penguji II**

**Penguji III**

**Khoirurrosyidin, S.IP. M.Si**  
NIDN. 0705057501

**Robby Darwis Nasution, S.IP, MA**  
NIDN. 0728028603

**Dian Suluh K. Dewi, S.Sos. I, M.AP**  
NIDN. 0703058104

**Mengetahui**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

**Drs. JUSUF HARSONO, M.Si**  
NIK.19620113 198909 12

## **LEMBAR PERSEMBAHAN**

Dengan penuh kebanggaan karya tulis ini kupersembahkan kepada Gemiati istriku tercinta yang terus menemani, memberikan semangat selalu setia dalam segala hal. Anak-anakku tersayang Yudi Arif Santoso, ST, Rifki Riyadani dan Fardan Satria Zaki kalian adalah semangatku untuk menyelesaikan segala urusan di dunia dalam rangka mengharapkan RidloNya

**SUYITNO**

## **MOTTO**

**“Aja Ketungkul Marang Kalungguhan, Kadonyan lan  
Kemareman(Janganlah terobsesi atau terkungkung oleh keinginan untuk  
memperoleh kedudukan, kebendaan dan kepuasan duniawi)”**

**(Eyang Suro)**

**“Aja Kuminter Mundak Keblinger, Aja Cidra Mundak Cilaka (Jangan  
merasa paling pandai agar tidak salah arah,jangan suka berbuat curang  
agar tidak celaka)”.**

**(Eyang Suro)**

**“Memayu Hayuning Bawono”  
(Eyang Suro)**

## ABSTRAK

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimaksudkan sebagai payung hukum agar tidak terjadi penyimpangan dan tujuan pemberian keuangan desa dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban dengan melaksanakan prinsip akuntabilitas dan juga transparansi dengan baik. Desa memiliki posisi langsung sebagai penerima dana yang penggunaannya harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran warga. Sama sekali tak sebatas kemakmuran perangkat desa. Sehingga kebijakan para perangkatnya memiliki peran sangat kuat karena menjadi kunci utama. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan asas akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di Desa Jarak Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo serta faktor yang turut mendukung serta menghambatnya. Azas akuntabilitas telah dilaksanakan dengan baik di semua tahapan pengelolaan keuangan Desa Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa. Akuntabilitas sudah dilaksanakan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, tahap pelaporan dan pada tahap pertanggung jawaban. Faktor pendukung pelaksanaan prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Jarak adalah faktor kerjasama, komunikasi yang baik, partisipasi, kesabaran dan semangat untuk membangun desa. Faktor-faktor tersebut terus memacu semangat para pelaku untuk melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-bainya. Faktor penghambat implementasi pelaksanaan prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Jarak adalah faktor pemahaman pelaku yang masih kurang terhadap perubahan system dan juga materi undang-undang yang mencakup prosedur. Kedua faktor waktu yang sangat cepat juga menjadi faktor penghambat sehingga pekerjaan dilakukan dengan tergesa-gesa. Kepada Pemerintahan Desa Jarak supaya menjadikan setiap proses pengelolaan keuangan Desa sebagai bentuk pembelajaran untuk melangsungkan pembangunan dan pemerintahan kedepan. Pemahaman personil khususnya perangkat Desa terkait dengan berbagai kebijakan dalam koridor Undang-undang Desa dan Pengelolaan keuangan yang dicerminkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 harus terus ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan dan coaching yang diagendakan secara berkelanjutan baik dalam suasana formal maupun secara informal.

***Kata Kunci : Akuntabilitas, Kebijakan Publik, Pengelolaan, Keuangan Desa***

## ABSTRACT

*The Regulation of the Minister of Home Affairs Number 113 of 2014 concerning the Management of Village Finance holds as a legal standing to avoid deviations and financial goals from the planning stage to accountability by implementing the principles of accountability as well as transparency. The village has a direct position as the recipient of funds that should be utilized for the prosperity of the citizens. Absolutely limited to the prosperity of the village apparatus. In order for security is very strong because it becomes the main key. This study aims to find out how the implementation of the principle of accountability in financial management in the Village Distance District Siman Ponorogo as well as factors that also support also problem. The principle of accountability has been well implemented in all stages of financial management of Siman Village, Ponorogo Regency in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation No. 113 of 2014 on the management of village finances. Accountability has been implemented in the planning, implementation, administration, reporting and stage of accountability. The supporting factors for the implementation of the financial management accountability principle of Village are the factors of cooperation, good communication, participation, patience and passion to build the village. These factors continue to spur the spirit of the perpetrators to carry out the work with the best. Inhibiting factors in implementing the principle of accountability of village finance management Distance is a factor that still lacks the understanding of the perpetrators of the system changes as well as the material legislation that includes procedures. Factors very quickly also become an inhibiting factor for work done in haste. To the Village Government Distance can be done every process of village financial management as a form of learning to hold development and future government. Understanding the personnel, especially the village apparatus, is related to the various ways in the environment of the Village Law and Financial Management as reflected through the Minister of Home Affairs Regulation No. 113 of 2014 should continue to be improved through training and coaching that are fully planned in both formal and informal settings.*

**Keywords: Accountability, Public Policy, Management, Village Finance**

## **KATA PENGANTAR**



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah yang menciptakan bumi dengan segala isinya, sehingga melalui pertanda-pertandanya, manusia diberikan pengetahuan dimana proses tersebut dapat dilakukan melalui proses belajar mengajar, manusia kemudian diciptakan menjadi makhluk yang sempurna diantara ciptaanNYA yang lain. Dalam proses pembelajaran ini, kemudian salah satunya menghasilkan Tugas Akhir berupa Skripsi. Dalam proses penyelesaian skripsi penulis merasa banyak terbantu oleh fihak-fihak yang mendukung tanpa lelah, baik secara materiil maupun imateriil sehingga kiranya ucapan terimakasih bisa kami sematkan dalam skripsi ini. Ucapan terimakasih ini kami sampaikan kepada :

1. Bapak Drs. Jusuf Harsono, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
2. Bapak Robby Darwis Nasution, S.IP., MA sebagai ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
3. Ibu Dian Suluh Kusuma Dewi, S.Sos. I, M.AP, sebagai pembimbing skripsi ini yang telah membimbing dengan penuh kesabaran.
4. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang selalu memberikan ilmu dan nasehat yang bermanfaat sekali bagi saya untuk masa depan.
5. Semua pihak yang telah membantu yang tidak mungkin dapat saya sebutkan satu persatu dalam penulisan ini terima kasih atas dukungan kalian semuanya, semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan kepada kalian semua....Aamiin.

Demikianlah ucapan terimakasih ini kami haturkan, apabila ada salah kata dan khilaf, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalamualaikum, Wr Wb

**SUYITNO**  
**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : SUYITNO

NIM : 1322 1252

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Skripsi dengan judul : **“AKUNTABILITAS PUBLIK TERHADAP PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 113 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA JARAK KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO”**

Adalah hasil karya saya dan naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka.

2. Apabila ternyata di dalam skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia SKRIPSI ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSCLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo 25 Januari 2018  
Yang menyatakan

**SUYITNO**  
**NIM. 1322 1252**  
**DAFTAR ISI**

<b>COVER JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>COVER DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS KARYA</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>7</b>
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>7</b>
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	<b>8</b>
<b>E. Penegasan Istilah</b> .....	<b>9</b>
<b>F. Tinjauan Pustaka</b> .....	<b>11</b>
<b>1. Akuntabilitas Publik</b> .....	<b>11</b>
<b>a. Pengertian Akuntabilitas Publik</b> .....	<b>11</b>
<b>b. Prinsip dan Ciri Akuntabilitas Publik</b> .....	<b>13</b>
<b>c. Tipe-Tipe Akuntabilitas Publik</b> .....	<b>15</b>
<b>d. Indikator Akuntabilitas Publik</b> .....	<b>16</b>
<b>e. Akuntabilitas Publik dalam Pengelolaan</b> <b>Keuangan Desa</b> .....	<b>17</b>
<b>2. Desa dan Otonomi Desa</b> .....	<b>19</b>
<b>a. Pengertian Desa</b> .....	<b>19</b>
<b>b. Otonomi Desa</b> .....	<b>20</b>
<b>3. Pemerintahan Desa dan Kewenangannya</b> .....	<b>23</b>
<b>4. Pengelolaan Keuangan Desa menurut Peraturan</b> <b>Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014</b> <b>Tentang Pengelolaan Keuangan Desa</b> .....	<b>24</b>
<b>a. Asas Pengelolaan Keuangan Desa</b> .....	<b>24</b>
<b>b. Tugas Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa</b> ..	<b>27</b>
<b>c. Tahap Pengelolaan Keuangan Menurut Peraturan</b> <b>Menteri Dalam Negeri No 113 tahun 2014</b> .....	<b>29</b>
<b>G. Metodologi Penelitian</b> .....	<b>33</b>
<b>1. Jenis Penelitian</b> .....	<b>33</b>
<b>2. Informan Penelitian</b> .....	<b>34</b>

3. Teknik Penentuan Informan.....	35
4. Teknik Pengumpulan Data .....	35
a. Teknik pengumpulan data primer .....	35
b. Teknik pengumpulan data Sekunder.....	37
5. Teknik Analisa Data .....	38
<b>BAB II DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Desa Jarak Kecamatan Ponorogo .....	40
1. Struktur Organisasi .....	41
B. Gambaran Pengelolaan Keuangan Desa Jarak.....	42
<b>BAB III PENYAJIAN DAN ANALISA DATA</b>	
A. Penyajian Data.....	44
1. Karakteristik Informan Penelitian .....	44
2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Jarak .....	44
a. Tahap Perencanaan .....	45
a. Pelaksanaan .....	51
b. Penatausahaan .....	60
c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban .....	62
3. Faktor Yang Menjadi Penunjang dan Kendala .....	67
B. Analisa Data.....	70
1. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Jarak Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo .....	70
2. Faktor Yang Menjadi Pendukung dan Pengendala Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Jarak Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo .....	77
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>82-83</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rencana Anggaran Pendapatan Desa Jarak .....	42
Tabel 2.2 Rencana Anggaran Pembelanjaan Desa Jarak .....	43
Tabel 3.1 Karakteristik Informan .....	44
Tabel 3.2 <i>Cek list</i> Akuntabilitas Perencanaan .....	51
Tabel 3.3 APBDesa Jarak Tahun 2016 .....	56
Tabel 3.4 Rekapitulasi Dana Transfer Desa Jarak Tahun 2017 .....	55
Tabel 3.5 Kegiatan Fisik Desa Jarak Tahun 2017 .....	57
Tabel 3.6 Kegiatan Non Fisik Desa Jarak Tahun 2017 .....	58
Tabel 3.7 <i>Cek list</i> Akuntabilitas Pelaksanaan .....	59
Tabel 3.8 Ringkasan APBD Desa Jarak .....	60
Tabel 3.9 <i>Cek list</i> Akuntabilitas Penatausahaan .....	62
Tabel 3.10 <i>Cek list</i> Akuntabilitas Pelaporan dan Pertanggungjawaban .....	64

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Desa Jarak .....	44
Gambar 3.1 Bentuk Sosialisasi/Pelaporan Kepada Masyarakat .....	66